

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Kompas.com sebagai Media Online Nasional

2.1.1. Profil dan Sejarah Kompas.com

Kompas.com merupakan portal berita daring yang dikelola oleh PT Kompas Cyber Media, anak perusahaan Kompas Gramedia Group. Portal ini pertama kali beroperasi pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online, menjadikannya sebagai salah satu situs berita tertua di Indonesia yang hadir sejak masa awal perkembangan internet nasional. Pada tahun 2008, Kompas Online bertransformasi menjadi Kompas.com dengan identitas dan arsitektur platform yang lebih modern, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat Indonesia ke ranah digital.

Sebagai entitas media digital yang lahir dari induk perusahaan dengan rekam jejak lebih dari lima dekade dalam industri pers nasional, Kompas.com mewarisi tradisi jurnalisme yang menjunjung tinggi akurasi, independensi, dan keberimbangan penyajian informasi. Berdasarkan laporan *Reuters Institute Digital News Report 2022*, sebanyak 88 persen responden Indonesia menyatakan mengakses media online sebagai sumber berita utama mereka Reuters Institute (2022). Dalam konteks tersebut, Kompas.com menempati posisi strategis sebagai salah satu portal berita nasional yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, di mana pemberitaan yang diproduksinya memiliki jangkauan distribusi yang luas kepada berbagai segmen khalayak, termasuk dalam meliput isu-isu kebijakan daerah yang memiliki dampak sosial-ekonomi signifikan seperti isu perpajakan di Kabupaten Pati.

Dari sisi argumentasi akademik dan metodologis, pemilihan satu media sebagai objek tunggal dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Krippendorff (2013)

dalam *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* menegaskan bahwa validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian analisis isi kuantitatif lebih ditentukan oleh ketepatan pemilihan unit analisis yang relevan dengan pertanyaan penelitian daripada oleh jumlah sumber yang dilibatkan. Dalam penelitian ini, seluruh 44 artikel yang dianalisis diperoleh melalui teknik total sampling dari satu sumber, sehingga tidak ada data yang terlewatkan pada periode pengamatan. Pendekatan ini justru menjamin kerepresentatifan dan konsistensi korpus, yang merupakan prasyarat utama dalam analisis isi yang sah. Lebih lanjut, penggunaan satu media arus utama sebagai objek tunggal selaras dengan tradisi penelitian analisis isi yang berfokus pada pola sistemik dalam produksi konten satu institusi media. Sebagaimana ditegaskan oleh Neuendorf (2022) dalam *The Content Analysis Guidebook*, penelitian analisis isi yang mengkaji pola pemberitaan satu media besar secara komprehensif dalam satu periode waktu menghasilkan temuan yang dapat menggambarkan logika produksi editorial media tersebut secara mendalam, sesuatu yang tidak dapat dicapai secara optimal apabila cakupan dibagi ke berbagai media dengan kedalaman yang lebih terbatas. Dengan mempertimbangkan posisi Kompas.com sebagai media nasional arus utama yang paling dipercaya di Indonesia berdasarkan Reuters Institute Digital News Report (2023), dapat disimpulkan bahwa pola pemberitaannya terhadap suatu isu kebijakan daerah memiliki representativitas yang memadai untuk menggambarkan bagaimana media nasional arus utama pada umumnya mengonstruksi realitas isu fiskal daerah kepada khalayak nasional.

Secara lebih spesifik, terdapat tiga alasan akademik dan metodologis yang mempertegas mengapa Kompas.com dipilih di antara media nasional lainnya. Pertama, dari sisi posisi dalam ekosistem media digital Indonesia, Kompas.com menempati posisi yang secara konsisten teratas dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan *Reuters Institute Digital News Report (2023)*, Kompas

meraih tingkat kepercayaan tertinggi di Indonesia sebesar 69 persen dari seluruh responden, melampaui CNN Indonesia (68 persen), TVRI, dan Detik.com (Reuters Institute, 2023). Data ini diperbarui dalam laporan 2024 yang juga menempatkan Kompas dan TVRI sebagai merek media paling dipercaya di Indonesia berdasarkan survei 2.012 responden yang dilakukan oleh YouGov (Reuters Institute, 2024). Temuan ini mengandung implikasi akademis yang signifikan: media dengan tingkat kepercayaan tertinggi memiliki pengaruh agenda-setting yang paling besar terhadap persepsi publik nasional, sehingga kajian terhadap pola pemberitaannya merupakan studi yang paling representatif untuk memahami bagaimana media nasional arus utama mengonstruksi isu kebijakan fiskal daerah. Kedua, dari sisi trafik digital, data Similarweb menunjukkan bahwa Kompas.com secara konsisten masuk dalam dua besar portal berita paling banyak dikunjungi di Indonesia bersama Detik.com (Similarweb, 2024). Namun berbeda dengan Detik.com yang dikenal dengan model pemberitaan berbasis kecepatan dan volume tinggi, Kompas.com dikenal dengan standar jurnalisme verifikasi yang lebih ketat. Perbedaan karakter editorial ini menjadikan Kompas.com lebih relevan sebagai objek kajian dalam penelitian analisis isi yang berfokus pada atribut dan sentimen pemberitaan, karena pola editorial yang terstandarisasi memungkinkan pengukuran atribut pemberitaan yang lebih konsisten dan dapat dianalisis secara sistematis. Ketiga, dari sisi relevansi konten terhadap isu yang diteliti, Kompas.com memiliki unit liputan regional yang aktif, termasuk rubrik Jawa Tengah, sehingga isu kebijakan pajak di Kabupaten Pati yang merupakan isu daerah dapat memperoleh perhatian pemberitaan yang berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik dalam arsip digital Kompas.com. Pemilihan media lokal seperti Suara Merdeka atau Radar Pati, sebaliknya, akan menghasilkan temuan yang terbatas pada perspektif regional semata dan tidak mampu merepresentasikan bagaimana media nasional arus utama membingkai isu fiskal daerah untuk konsumsi khalayak nasional, yang justru menjadi inti

pertanyaan penelitian ini. Argumen ini diperkuat oleh Mendez et al. (2020) yang secara empiris menunjukkan bahwa media nasional arus utama cenderung mengonstruksi isu kebijakan daerah dengan penekanan atribut dan kecenderungan tonalitas yang berbeda dibandingkan media lokal, sehingga kajian terhadap media nasional arus utama menghasilkan temuan yang tidak dapat begitu saja disubstitusi dengan kajian media lokal.

Berdasarkan data WAN-IFRA (2024), KG Media induk Kompas.com mengoperasikan sekitar 100 ruang redaksi di seluruh Indonesia dengan lebih dari 2.000 jurnalis, menjadikan Kompas.com sebagai salah satu platform berita dengan jaringan liputan terluas secara nasional. Posisi ini diperkuat oleh laporan *Reuters Institute Digital News Report 2023* yang menempatkan Kompas sebagai merek media paling dipercaya di Indonesia berdasarkan survei terhadap konsumen berita digital *Reuters Institute* (2023). Kepercayaan publik yang tinggi terhadap Kompas.com menjadi fondasi relevansi objek penelitian ini, mengingat bahwa pemberitaan yang dihasilkan oleh media dengan tingkat kepercayaan tinggi cenderung memiliki dampak yang lebih signifikan dalam membentuk pemahaman khalayak terhadap suatu isu kebijakan publik.

2.1.2. Karakteristik Platform dan Model Pemberitaan Digital

Kompas.com beroperasi sebagai media online dengan karakteristik platform yang membedakannya secara fundamental dari media cetak konvensional. Dalam metodologi analisis isi kuantitatif, media digital memiliki karakteristik distribusi informasi yang bersifat kontinu dan terarsip, sehingga seluruh konten yang dipublikasikan dapat diakses, diverifikasi, dan dianalisis secara sistematis oleh peneliti. Karakteristik ini menjadi salah satu keunggulan metodologis yang menjadikan media online sebagai sumber data yang valid dan reliabel dalam penelitian analisis isi kuantitatif.

Model pemberitaan Kompas.com mengikuti standar jurnalisme digital yang memanfaatkan format multimedia dan sistem hiperteks. Setiap artikel yang dipublikasikan dilengkapi dengan kategorisasi topik, penandaan kata kunci, serta tautan silang antarberita yang memungkinkan penelusuran konteks suatu isu secara lebih menyeluruh. Proses redaksional Kompas.com juga mencakup mekanisme *editing* dan verifikasi berlapis sebelum suatu artikel dipublikasikan kepada publik. Dalam konteks isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati, model pemberitaan seperti ini memungkinkan Kompas.com untuk menyajikan laporan yang berkesinambungan, mulai dari kemunculan isu, dinamika resistensi sosial, pembahasan di tingkat legislatif, hingga penyelesaian kebijakan dalam satu ekosistem informasi yang terintegrasi dan terdokumentasi secara digital.

Ketersediaan arsip digital yang lengkap dan dapat diakses secara publik ini sejalan dengan salah satu prinsip utama dalam desain analisis isi yang dikemukakan Krippendorff (2013), yakni bahwa teks yang menjadi objek analisis harus bersifat *readable* atau dapat dibaca ulang secara konsisten oleh berbagai pihak guna menjamin replikabilitas dan objektivitas penelitian. Dengan demikian, karakteristik platform Kompas.com sebagai media online yang memiliki arsip digital terstruktur secara langsung mendukung standar metodologis analisis isi kuantitatif yang diterapkan dalam penelitian ini.

2.1.3. Posisi Kompas.com dalam Ekosistem Media Digital Indonesia

Dalam ekosistem media digital Indonesia, Kompas.com menempati posisi sebagai media arus utama (*mainstream media*) yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan agenda informasi nasional. Kajian tentang lanskap industri media di Indonesia menunjukkan bahwa media arus utama bersifat oligopolistik dan didominasi oleh sejumlah konglomerat media besar, di mana Kompas Gramedia Group menjadi salah satu pemain dominan yang menentukan arah dan kecenderungan informasi yang dikonsumsi masyarakat luas. Posisi struktural ini menempatkan

Kompas.com tidak sekadar sebagai distributor informasi, tetapi juga sebagai aktor editorial yang memiliki kapasitas untuk menentukan isu mana yang layak mendapat perhatian nasional.

Signifikansi posisi Kompas.com dalam ekosistem media digital ini memiliki implikasi langsung terhadap relevansi penelitian. Ketika Kompas.com memilih untuk meliput isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati secara berkelanjutan, keputusan editorial tersebut mencerminkan penilaian bahwa isu daerah tersebut memiliki nilai berita (*news value*) yang melampaui batas administratif kabupaten. Hal ini selaras dengan temuan Wlezien dan Soroka (2024) dalam jurnal *American Political Science Review* yang menunjukkan bahwa konten pemberitaan media mampu merefleksikan perhatian khalayak terhadap suatu regulasi, termasuk pada isu ekonomi di tingkat daerah. Dengan kata lain, intensitas dan kecenderungan pemberitaan Kompas.com terhadap suatu isu kebijakan secara tidak langsung menjadi cerminan dari derajat kepentingan isu tersebut di mata publik nasional.

Pemilihan Kompas.com sebagai objek penelitian juga didukung oleh pertimbangan metodologis terkait ketersediaan dan aksesibilitas data. Dalam analisis isi kuantitatif, kelengkapan dan ketertelusuran korpus teks merupakan prasyarat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data penelitian. Arsip digital Kompas.com yang terstruktur, dapat diakses secara publik, dan tersedia dalam format teks yang terdokumentasi dengan baik memenuhi standar tersebut. Dalam penelitian analisis isi berbasis media digital, kemampuan peneliti untuk mengakses dan memverifikasi seluruh unit analisis secara konsisten merupakan syarat fundamental yang menentukan kualitas data yang dihasilkan.

2.2 Isu Kenaikan Pajak di Kabupaten Pati

2.2.1. Konteks Kebijakan Perpajakan Daerah di Indonesia

Kebijakan perpajakan daerah di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka desentralisasi fiskal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan jenis, tarif, dan mekanisme pemungutan pajak daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan fiskal masing-masing wilayah. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dituntut menyeimbangkan antara kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta prinsip keadilan fiskal yang menjadi landasan normatif pemungutan pajak.

Salah satu instrumen fiskal utama yang dikelola pemerintah daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 adalah penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menentukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang penuh untuk menetapkan nilai NJOP melalui peraturan kepala daerah, yang secara langsung berdampak pada beban pajak properti yang ditanggung masyarakat. Penetapan NJOP dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar properti, kondisi ekonomi daerah, dan target penerimaan PAD. Dalam konteks perpajakan daerah, sensitivitas publik terhadap kebijakan kenaikan NJOP atau tarif pajak umumnya tinggi, mengingat dampaknya yang langsung menyentuh beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Fišar, Reggiani, Sabatini, dan Špalek (2022) dalam jurnal *International Tax and Public Finance (Springer)* membuktikan secara eksperimental bahwa cara media menyajikan informasi

terkait kebijakan fiskal pemerintah, baik melalui tonalitas positif, netral, atau negatif, berkaitan erat dengan cara publik memaknai kebijakan perpajakan tersebut. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memahami karakteristik dan sentimen pemberitaan media dalam kajian kebijakan fiskal daerah.

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik fiskal daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Dalam kerangka otonomi daerah yang diperkuat oleh UU No. 1 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pati berwenang menetapkan besaran NJOP dan tarif pajak daerah lainnya sesuai dengan perkembangan nilai properti dan kebutuhan pendapatan daerah. Kewenangan ini dieksekusi melalui penetapan regulasi teknis oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pati yang dilegitimasi oleh peraturan bupati. Penetapan NJOP yang dinilai tidak proporsional atau tidak dikomunikasikan secara memadai kepada masyarakat berpotensi memunculkan resistensi publik yang signifikan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus kenaikan pajak daerah Kabupaten Pati pada tahun 2025.

2.2.2. Kronologi dan Dinamika Isu Kenaikan Pajak di Kabupaten Pati

Isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati mencuat ke permukaan publik pada pertengahan tahun 2025, tepatnya memasuki bulan Agustus 2025, ketika Pemerintah Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo menetapkan kebijakan penyesuaian NJOP melalui peraturan bupati yang mengakibatkan kenaikan signifikan beban pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat. Kenaikan yang dilaporkan mencapai hingga 250 persen tersebut memicu gelombang keberatan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari warga biasa, pelaku usaha, hingga kelompok organisasi massa yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Besarnya kenaikan NJOP ini

menempatkan isu pajak Pati sebagai salah satu isu fiskal daerah yang memiliki daya tarik pemberitaan tinggi bagi media nasional, mengingat skala dampak sosial-ekonominya yang luas.

Resistensi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan pajak ini berkembang menjadi gerakan terorganisir yang dimotori oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Koordinasi aksi protes dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Teguh Istiyanto selaku koordinator aksi, serta didukung oleh organisasi kemasyarakatan dengan figur seperti Cahya Basuki. Kelompok masyarakat yang terdampak secara spesifik, seperti eks-pegawai RSUD Kabupaten Pati, turut menyuarakan keberatan terhadap beban pajak yang dinilai memberatkan secara ekonomi. Dinamika isu semakin kompleks ketika tuntutan masyarakat berkembang melampaui sekadar pembatalan kenaikan pajak, mencakup desakan pengunduran diri Bupati Sudewo atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dari perspektif jurnalistik, dinamika isu yang berlangsung di Kabupaten Pati ini memenuhi sejumlah kriteria *news value* yang mendorong media nasional untuk memberikan perhatian. Isu ini melibatkan konfliktara otoritas pemerintah daerah dan masyarakat sipil, dampak ekonomi yang terukur dan signifikan bagi banyak pihak, serta perkembangan yang berkesinambungan mulai dari penetapan kebijakan hingga respons serta penyelesaiannya. Perkembangan isu ini berlangsung sepanjang periode Agustus hingga Desember 2025, mencakup beberapa fase yang dapat diidentifikasi secara kronologis: pertama, fase kemunculan isu (Agustus 2025) yang ditandai publikasi kebijakan kenaikan NJOP oleh Bapenda Kabupaten Pati; kedua, fase eskalasi resistensi publik (September–Oktober 2025) yang diwarnai meningkatnya aksi keberatan dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil; ketiga, fase puncak ketegangan (November 2025) yang ditandai tekanan masif terhadap pemerintah daerah disertai tuntutan pengunduran diri bupati; dan keempat, fase

resolusi (Desember 2025) yang ditandai oleh keputusan Bupati Sudewo untuk membatalkan kenaikan NJOP sebagai respons atas aspirasi masyarakat.

2.2.3. Aktor-Aktor Kunci dalam Dinamika Isu

Dalam dinamika isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati, terdapat sembilan kelompok aktor yang berperan dalam pemberitaan dan menjadi fokus identifikasi dalam penelitian analisis isi ini. Pertama, pihak pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati Sudewo sebagai pengambil kebijakan utama, didukung oleh Sekretaris Daerah dan pejabat teknis dari instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pihak pemerintah daerah menempati posisi sentral sebagai pihak yang merumuskan dan mengeksekusi kebijakan perpajakan yang menjadi sumber kontroversi, sekaligus sebagai pihak yang pada akhirnya mengambil keputusan pembatalan kebijakan tersebut.

Kedua, kelompok warga dan pihak-pihak yang terdampak langsung, seperti eks-pegawai RSUD dan masyarakat pembayar pajak pada umumnya, yang mewakili dimensi dampak konkret dari kebijakan kenaikan pajak. Ketiga, kelompok aliansi masyarakat dan organisasi massa yang menjadi motor penggerak resistensi publik, merepresentasikan suara kolektif warga yang merasa terbebani oleh kebijakan fiskal yang dinilai tidak proporsional. Keempat, aktor keamanan yang diwakili oleh institusi kepolisian Polda Jateng dan Polresta Pati yang hadir sebagai pihak yang memvalidasi situasi keamanan dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat. Kelima, DPRD Kabupaten Pati yang dikutip terkait pembahasan legislatif dan tanggapan atas kebijakan yang berlangsung. Keenam, Komnas HAM yang memberikan perspektif perlindungan hak warga dalam konteks konflik kebijakan. Ketujuh, akademisi yang memberikan analisis ilmiah dan konteks kebijakan. Kedelapan, tim hukum yang dikutip terkait aspek legalitas dan upaya hukum. Kesembilan, tim cek fakta yang melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi yang beredar terkait isu pajak Kabupaten Pati.

Identifikasi narasumber ini penting dalam konteks penelitian analisis isi kuantitatif karena pemilihan narasumber oleh media merupakan salah satu indikator karakteristik pemberitaan yang dapat diukur secara sistematis. Sebagaimana dijelaskan Neuendorf (2022) dalam "The Content Analysis Guidebook" edisi kedua, identifikasi narasumber yang dikutip dalam teks berita merupakan variabel yang mencerminkan keberpihakan akses sumber informasi dalam pemberitaan media, sekaligus menunjukkan siapa yang diberikan otoritas suara oleh media dalam suatu diskursus kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, variabel narasumber dominan menjadi salah satu indikator dalam mengukur karakteristik pemberitaan Kompas.com terhadap isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati, bersama dengan intensitas kemunculan berita dan kategori isu yang diliput.

2.3 Pemberitaan Isu Pajak Pati di Kompas.com

2.3.1. Gambaran Umum Korpus Berita

Korpus berita yang menjadi objek dalam penelitian ini mencakup seluruh artikel yang dipublikasikan Kompas.com dengan kata kunci "Pajak Pati" atau "Pajak Kabupaten Pati" pada periode Agustus hingga Desember 2025. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kurun waktu tersebut merupakan puncak pemberitaan (*peak of coverage*) isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang ditandai dengan intensitas publikasi yang tinggi seiring eskalasi dinamika isu di lapangan. Penggunaan teknik total sampling atau sensus memastikan bahwa tidak ada unit analisis yang terlewatkan, sehingga gambaran mengenai karakteristik dan sentimen pemberitaan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan representatif terhadap keseluruhan pola pemberitaan Kompas.com pada periode tersebut.

Artikel-artikel berita dalam korpus ini mencakup berbagai format pemberitaan yang lazim dalam jurnalisme digital. Krippendorff (2013) menegaskan bahwa teks yang dianalisis dalam

analisis isi mencakup segala bentuk komunikasi yang terdokumentasi dan dapat dibaca ulang, termasuk artikel berita dalam berbagai format. Variasi format pemberitaan mulai dari berita singkat yang menyajikan informasi perkembangan terbaru hingga laporan yang menyertakan latar belakang dan konteks kebijakan mencerminkan cara Kompas.com mendekati isu kenaikan pajak Pati dari sudut pandang dan kedalaman informasi yang beragam sepanjang periode penelitian. Variasi ini sendiri menjadi bagian dari karakteristik pemberitaan yang layak untuk diidentifikasi dan diukur secara sistematis.

Secara metodologis, penetapan korpus berita ini mengikuti prinsip-prinsip unitisasi dalam analisis isi, yakni bahwa unit analisis harus didefinisikan secara jelas, konsisten, dan dapat diidentifikasi secara terukur. Dalam penelitian ini, setiap artikel berita yang memenuhi kriteria kata kunci dan periode waktu yang telah ditetapkan diperlakukan sebagai satu unit analisis yang berdiri sendiri. Kejelasan definisi unit analisis ini menjadi prasyarat penting untuk menjamin objektivitas proses pengodean data dan konsistensi pengukuran antar-koder dalam penelitian.

2.3.2. Periode dan Pola Kemunculan Pemberitaan

Periode pemberitaan isu kenaikan pajak Kabupaten Pati di Kompas.com berlangsung selama lima bulan, dari Agustus hingga Desember 2025. Rentang waktu ini mencakup beberapa fase perkembangan isu yang berbeda secara substansial: fase awal kemunculan isu yang ditandai pemberitaan mengenai penetapan kebijakan kenaikan NJOP; fase eskalasi yang diwarnai meningkatnya resistensi publik dan rencana aksi demonstrasi; fase puncak ketegangan yang ditandai tekanan terhadap pemerintah daerah; serta fase resolusi yang ditandai keputusan pembatalan kenaikan NJOP. Pemahaman terhadap fase-fase ini penting karena pola distribusi pemberitaan dalam suatu periode mencerminkan bagaimana media merespons dan mengikuti perkembangan suatu isu kebijakan dari waktu ke waktu.

Pola kemunculan pemberitaan dalam analisis isi kuantitatif dikenal sebagai indikator visibilitas isu, yakni seberapa sering dan dalam jangka waktu berapa lama suatu isu mendapatkan ruang pemberitaan di media. Wlezien dan Soroka (2024) dalam *American Political Science Review* menunjukkan bahwa frekuensi pemberitaan media terhadap suatu regulasi mencerminkan perhatian khalayak terhadap kebijakan tersebut, dan bahwa terdapat keterkaitan yang dapat diukur antara volume pemberitaan media dengan tingkat *saliency* isu di benak publik. Dalam konteks penelitian ini, pola kemunculan pemberitaan isu pajak Pati di Kompas.com selama periode Agustus–Desember 2025 menjadi salah satu indikator kuantitatif yang menggambarkan derajat kepentingan isu tersebut dalam agenda pemberitaan media nasional.

Selain intensitas kemunculan berita, karakteristik pemberitaan dalam penelitian ini juga diidentifikasi melalui kategori isu yang diliput dan narasumber dominan yang dikutip. Kajian tentang media slant dan kebijakan fiskal mencatat bahwa tonalitas dan seleksi informasi dalam pemberitaan media merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk cara publik memaknai suatu kebijakan fiskal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap periode dan pola kemunculan pemberitaan isu pajak Pati di Kompas.com bukan sekadar informasi deskriptif latar belakang, melainkan merupakan bagian integral dari variabel karakteristik pemberitaan yang dianalisis secara kuantitatif dalam penelitian ini.

2.3.3. Relevansi Kompas.com sebagai Objek Penelitian Analisis Isi Kuantitatif

Pemilihan Kompas.com sebagai objek penelitian didasarkan pada dua pertimbangan utama yang saling melengkapi: pertimbangan metodologis dan pertimbangan substantif. Secara metodologis, Kompas.com menyediakan arsip digital yang lengkap, terstruktur, dan dapat diakses secara publik. Ketersediaan arsip digital yang terdokumentasi dengan baik ini memenuhi standar metodologis bahwa media yang dijadikan sumber data dalam analisis isi kuantitatif harus

menyediakan korpus teks yang dapat diakses, diverifikasi, dan direplikasi oleh peneliti lain secara konsisten. Tanpa ketersediaan arsip yang memadai, integritas dan replikabilitas penelitian analisis isi tidak dapat dijamin.

Secara substantif, posisi Kompas.com sebagai media nasional arus utama memberikan perspektif yang unik dan bernilai dalam kajian ini. Hal ini relevan dengan temuan kajian media slant bahwa cara media menyajikan informasi mengenai kebijakan fiskal pemerintah, termasuk pilihan tonalitas dan seleksi narasumber, berdampak pada cara masyarakat memaknai kebijakan perpajakan tersebut. Dalam konteks pemberitaan isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Kompas.com sebagai media nasional berperan membawa isu fiskal daerah ke dalam ruang perbincangan publik nasional, sehingga karakteristik dan sentimen pemberitaannya menjadi relevan untuk dikaji secara sistematis.

Lebih jauh, penggunaan Kompas.com sebagai objek penelitian selaras dengan pandangan Krippendorff (2013) bahwa konteks di mana teks diproduksi dan dikonsumsi merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam desain analisis isi, karena konteks tersebut menentukan kerangka inferensi yang valid dan relevan. Kompas.com sebagai media arus utama yang memiliki orientasi jurnalisme nasional dengan jangkauan pembaca yang luas merupakan konteks produksi teks yang spesifik dan dapat diidentifikasi secara jelas. Kejelasan konteks produksi ini menjadi salah satu fondasi yang memperkuat validitas inferensi yang dihasilkan dari analisis isi terhadap korpus berita Kompas.com mengenai isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati.